

MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI UNSUR TERENDAH
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN I PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2025
TAHUN 2025



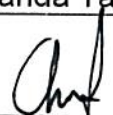
TAHUN 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS 3 NILAI TERENDAH LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) TRIWULAN I
PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 2025 SAMPAI DENGAN 31 MARET 2025

No.	MONITORING	EVALUASI	TINDAK LANJUT
	3 (tiga) nilai terendah dari Unsur Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan I Tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025	Dari hasil pengolahan data SiSuper Pengadilan Negeri Pangkalan Balai SKM Periode Triwulan I Tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025, jumlah tersebut didapat dari data SiSuper di anjungan area PTSP dan surat yang dikirimkan ke Satker Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengisi SiSuper. Terdapat 3 nilai terendah dari 9 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat yaitu : 1. (U1) Dengan Nilai 204; 2. (U2) Dengan Nilai 204; 3. (U3) Dengan Nilai 204;	Tindaklanjut atas monev 3 (tiga) nilai terendah agar segera dilaksanakan untuk perbaikan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
1.	Unsur Survei Kepuasan Masyarakat: Unsur Persyaratan (U1)	Unsur Biaya/Tarif merupakan unsur Ke-1 dari 9 Unsur SKM, dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? dengan pilihan jawaban yaitu: tidak sesuai sejumlah 0 responden, kurang sesuai sejumlah 0 responden, sesuai sejumlah 0 responden dan sangat sesuai sejumlah 51 responden; > Hasil analisis dari 51 responden	Tindaklanjut: ☐ ✓ Terdapat standar pelayanan yang memuat tentang persyaratan setiap pelayanan yang diberikan.
2.	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	Unsur Kompetensi Pelaksana merupakan Unsur ke-2 dari 9 Unsur SKM, dengan pertanyaan yaitu: Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada	Tindaklanjut: ☐ ✓ Terdapat prosedur perkara didalam website Pengadilan Negeri

		Pengadilan? dengan pilihan jawaban yaitu: tidak mudah sejumlah 0 responden, kurang mudah sejumlah 0 responden, mudah sejumlah 0 responden dan sangat mudah sejumlah 51 responden; > Hasil analisis dari 51 responden	Pangkalan Balai. ✓ Melakukan Briefing petugas PTSP agar setiap pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3.	Unsur Waktu Penyelesaian (U3)	> Unsur Waktu Penyelesaian merupakan Unsur Ke- 3 dari 9 Unsur SKM, dengan pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ? dengan pilihan jawaban yaitu: tidak cepat sejumlah 0 responden, kurang cepat sejumlah 0 responden, cepat sejumlah 0 responden dan sangat cepat sejumlah 51 responden; > Hasil analisis dari 51 responden ;	Tindaklanjut: ☐ ✓ Terdapat standar pelayanan yang memuat tentang estimasi waktu pelayananyangdiberikan.

Demikianlah monitoring dan evaluasi atas 3 (tiga) Unsur Terendah dari Laopran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan I Tahun 2025 Periode Tanggal 1 Januari s.d 31 Maret 2025 untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ayu Cahyani Sirait, S.H.,M.H.	Hakim	
2.	Bainal Hakim, S.H.	Panitera	

Eviden tindak lanjut Survei Kepuasan Masyarakat
Poin 1



Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Komplek Perkantoran Pemkab Banyuwangi, Mulya Agung, Banyuwangi 30911
Email : pn.pangkalanbalai@gmail.com

Bahasa Indonesia

Beranda
Halaman Utama

Tentang Pengadilan
Profil Satker

Layanan Publik
Informasi Pelayanan

Layanan Hukum
Prosedur & Biaya

Berita
Berita & Galeri

Hubungi Kami
Informasi, Saran & Pengaduan

Reformasi Birokrasi
Zona Integritas & Akreditasi

Tentang Pengadilan

Berita tentang MIA, HMA, Profil Pengadilan, Rute Model & Ajen, Peradilan, Profil Pegawai & Hakim, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Sistem Pengelolaan Pengadilan, Prosedur Berperkara, Layanan Bagi Penyandang Disabilitas, serta Tata Tertib Peradilan.



Pengumuman

INFORMASI SEPUTAR E-COURT MAHKAMAH AGUNG RI - Rabu, 25 Apr 2024

Survei

Standar Pelayanan

E-Court

Direktori Putusan

Info Perkara

Laporan Kinerja

Menu Tentang Pengadilan

PENGANTAR

PTSP

Survei Kepuasan Masyarakat

Standar Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Kemampuan Pelayanan

PROFIL PENGADILAN

Standar Pelayanan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH NEGERI PANGKALAN BALAI

Standar Pelayanan

Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Selengkapnya:

SK KMA No. 23/KPN.W6-U10/5K.HK1.2.5/I/2024
Lampiran SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012
[SK KPN Pangkalan Balai Mengenai Standar Pelayanan Peradilan](#)



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Komplek Perkantoran Pertiwi Banyuwani, Mulya Agung, Banyuwani 30911
Email : pu.panghalanhalal@gmail.com

Bahasa Indonesia +

Республики Беларусь
Знамя независимости и Агитация

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346127> on Tue, 23 May 2017 12:25:00 UTC
All use subject to [http://about.jstor.org/terms](#)



Department of Education

© 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from Pearson Education, Inc.

伊藤正史, 伊藤 正弘, 奥村 大輔

Berangkat dari niat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI dan badan badan peradilan di bawahnya dengan sebaik-baiknya, dan untuk memenuhi amanat UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Peradilan, maka pada tanggal 9 Februari 2012 Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 025/KMA/JSK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi setiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Selengkapnya:

SK KMA No. 23/KPN.W6-U10/SK HK1.2.5/I2024

Lampiran 5K KMA No. 026/KMA/5K/II/2012

SE, KPN, Rangkalan Dalam Merjounal Standar, Pelayanan, Pendidikan



Poin 3

[illegible]